Perjanjian *Milan Urban Food Policy Pact* (MUFPP) Dalam Pengembangan Sistem Pangan Berkelanjutan Di Kota Bandung

Dede Rohman
Kardina
Sulastri Pratiwi
Universitas Fajar

Abstract
This study purpose to explain and understanding the implementation of the Milan Urban Food Policy Pact (MUFPP) policy and framework in the Sustainable Food System Program in Bandung by the Municipality as an actor of international relations in paradiplomacy. This study uses the concept of paradiplomacy and urbanization that uses qualitative methods and with data collection techniques, literature studies and in-depth interviews. The results of the study explain that the implementation of the MUFPP policy and framework carried out in the city of Bandung in the steps of developing a sustainable food system is in accordance with the initial goal of the city of Bandung, namely the development of a sustainable food system program. It is proven in 3 policy categories and 12 points of framework or action recommendations that have been implemented by the City of Bandung.

Keywords: Food System, Paradiplomacy, Urbanization, MUFPP, Bandung City

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mengetahui bagaimana implementasi kebijakan dan kerangka kerja Milan Urban Food Policy Pact MUFPP dalam Program Sistem Pangan Berkelanjutan di Kota Bandung oleh pemerintah kotanya sebagai aktor hubungan internasional dalam paradiplomasi. Penelitian ini menggunakan konsep paradiplomasi dan urbanisasi yang menggunakan metode kualitatif dan dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menjelaskan bahwa implementasi kebijakan dan kerangka kerja MUFPP yang dilakukan di Kota Bandung dalam langkah pengembangan sistem pangan yang berkelanjutan berjalan sesuai dengan tujuan awal Kota Bandung, yaitu pengembangan program sistem pangan yang berkelanjutan. Terbukti pada 3 kategori kebijakan dan 12 poin kerangka kerja atau rekomendasi aksi yang telah diimplementasikan oleh Kota Bandung.

Kata-kata Kunci: Sistem Pangan, Paradiplomasi, Urbanisasi, MUFPP, Kota Bandung

Pendahuluan

Isu pangan global mulai mendapat perhatian pada tahun 1950-an sampai 1960-an, ketahanan pangan lebih ditekankan kepada ketersediaan pangan, baik pada tingkat nasional maupun global. Pada tahun 1970 isu ketahanan pangan semakin memprihatinkan ketika krisi pangan yang melanda Afrika terjadi karena gagal panen yang disebabkan oleh kekeringan, kemudian juga dikarenakan pertumbuhan penduduk yang begitu cepat dan produktivitas lahan yang terbatas, pertumbuhan output pertanian tahunan per kapita pada tahun 1960-an hanya sebesar 0,2% dan merosot tajam pada tahun 1970-an menjadi -1,4% (Yolanda, 2016).

Kekhawatiran akan ketahanan pangan di masa depan merupakan kekhawatiran yang tak terhindarkan, terutama di daerah perkotaan. Pada tanggal 25 September 2015, para pemimpin dunia secara resmi mengadopsi agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yang mencakup 17 tujuan dan 169 tujuan yang mewakili aksi global untuk periode 2015-2030 yang mengarah pada tujuan untuk mengentaskan kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. Lingkungan perkotaan adalah salah satu tempat yang memiliki banyak permasalahan yang timbul bersamaan dengan industrialisasi dan modernisasi yang semakin pesat, maka dari itu dengan mewujudkan tujuan-tujuan yang ada dalam poin SDGs dibutuhkan suatu pembangunan yang inklusif, efektif dan efisien yang dapat memperhatikan setiap aspek.

Seiring dengan perkembangan zaman permintaan terhadap pangan terus mengalami peningkatan, yang dapat memberikan kekhawatiran dalam pemenuhan pangan terutama di daerah urban. Tren revolusi digital di era globalisasi saat ini telah mengubah pola hidup hingga peradaban masa depan umat manusia. Salah satu fenomena yang dapat kita lihat secara langsung adalah akselerasi proses urbanisasi di seluruh dunia, yang dibuktikan melalui studi PBB tentang tren urbanisasi dunia pada tahun 2014 pertama kalinya dalam sejarah umat manusia. Lebih dari setengah populasi dunia (54%) hidup di daerah urban dan diperkirakan pada tahun 2050 akan mencapai (66%). Di Indonesia, (Pemkot Bandung/BSC, 2022) populasi urban telah mencapai (53,3%) di tahun 2015 dan diperkirakan akan meningkat menjadi (68%) di tahun 2035 berdasarkan penelitian *Citiasia Center of Smart Nation* (CCSN). Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat di daerah urban ini berakibat pada berkurangnya lahan pertanian yang memberikan kecemasan pada ketersediaan pangan di masa yang akan datang di daerah urban.

Bagi Indonesia, sektor pangan selalu diposisikan sebagai prioritas pembangunan nasional. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan nasional. Untuk itu perlu diwujudkan sebuah sistem pangan berkelanjutan yang mampu terap, sesuai dan memadai dengan kondisi praktik pangan di Indonesia dengan memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan termasuk kelompok rentan memperoleh akses dan terlibat aktif dalam sistem dan praktik pangan di Indonesia, sejalan dengan semangat inklusif yang diamanatkan oleh Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs).

Bandung sebagai salah satu kota metropolitan di Indonesia telah mengalami peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya yang signifikan. Pada 2018 jumlah

penduduk Kota Bandung mencapai angka 2.503.708 jiwa, selanjutnya pada tahun 2019 naik menjadi 2.507.888 jiwa dan mengalami kenaikan jumlah penduduk menjadi 2.510.103 jiwa di tahun 2020 (BPS, 2020). Kekhawatiran terhadap ketersediaan pangan di masa yang akan datang menjadi salah satu permasalahan yang penting untuk diantisipasi. Faktor yang membuat terjadinya kekhawatiran terhadap ketahanan pangan di Kota Bandung disebabkan beralihnya fungsi lahan pertanian dikota Bandung menjadi fungsi lain sehingga membawa konsekuensi perubahan orientasi sektor pertanian produksi menjadi pertanian olahan, juga sejalan dengan fungsi Kota Bandung sebagai kota jasa, kemandirian pangan lebih ditentukan ketersediaan dan kemampuan mengelola arus perdagangan. Di sisi lain, lebih dari 90% rasio pasokan pangan untuk kota Bandung diimpor dari luar daerah Kota Bandung (Sysadmin, 2016).

Dari fakta-fakta yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa ketersediaan pangan menjadi permasalahan yang mungkin saja dimasa depan akan dihadapi oleh Kota Bandung. Maka untuk mengatasinya, diperlukan suatu strategi dan pendekatan yang komprehensif, inklusif, efektif dan efisien dalam menghadapi permasalahan ketersediaan pangan. Pentingnya mengarusutamakan prinsip prinsip keberlanjutan di dalam praktik pangan di Kota Bandung dengan berbasis pada keanekaragaman pangan lokal dan kebutuhan gizi, serta memastikan akses yang inklusif ke sumber-sumber pangan bagi seluruh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan nasional.

Dalam upaya pengembangan sistem pangan yang berkelanjutan maka Pemerintah Kota Bandung dalam kerangka paradiplomasi membangun hubungan luar negeri dengan kota-kota lain di luar negeri dengan bergabung dalam Perjanjian *Milan Urban Food Policy Pact* (MUFPP) yang berkomitmen untuk mengembangkan sistem pangan berkelanjutan. MUFPP adalah sebuah perjanjian internasional yang menyatukan kota-kota di berbagai negara berupaya mengembangkan sistem pangan yang berkelanjutan, berbagi ide dan inovasi terbaru dalam pengembangan sistem pangan dan penanganan masalah pangan di daerah urban. Hal ini tentunya menjadi salah satu gerakan bersama yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan dalam pengembangan sistem pangan, penanganan permasalahan sampah makanan dan permasalahan ketahanan pangan dunia. Sebagai kota terpadat ke 6 di Asia Tenggara (bali.tribunnews.com, 2022), Kota Bandung sebagai topik penelitian karena kepedulian yang ditunjukkan Pemerintah Kota Bandung dalam mencegah permasalahan pangan di masa yang akan datang, dimana permasalahan pangan menjadi salah satu isu yang perlu untuk diperhatikan dan diantisipasi baik itu dalam lingkup nasional maupun internasional. Bergabung Pemerintah Kota Bandung dalam MUFPP melalui keran paradiplomasi sebagai bentuk partisipasi untuk mengembangkan sistem pangan yang berkelanjutan. Selain itu, Kota Bandung adalah Kota pertama di Asia Pasifik yang bergabung dalam MUFPP, karena kolaborasi yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung dengan Ricolto Veco sebagai INGO dalam beberapa kegiatan kampanye memberikan koneksi kepada Pemerintah Kota Bandung untuk bergabung dalam MUFPP.

Paradiplomasi: Sebagai kerangka pemikiran

Dalam studi ilmu hubungan internasional, paradigma kerjasama yang awalnya hanya dilakukan antara *actor state* kini telah berubah. Seiring perkembangan zaman kemudian aktor (bukan utama) lainnya seperti *sub-state actor* juga melakukan kerjasama luar negeri secara langsung, baik dengan pemerintah daerah di luar negeri, INGO, NGO maupun aktor lainnya dalam rangka merealisasikan kepentingan mereka secara spesifik. Fenomena aktivitas hubungan luar negeri yang dilakukan oleh *sub-state actor* ini disebut dengan istilah Paradiplomasi. Istilah paradiplomasi pertama kali diluncurkan dalam perdebatan akademik oleh ilmuwan asal Basque, Panayotis Soldatos tahun 1980-an sebagai penggabungan istilah *parallel diplomacy* menjadi paradiplomasi, yang mengacu pada makna *the foreign policy of non-central governments*, menurut Aldecoa, Keating dan Boyer. Istilah lain yang pernah dilontarkan oleh Ivo Duchacek untuk konsep ini adalah *micro-diplomacy* (Takdir, 2013).

Konsep paradiplomasi telah menjadi pendekatan yang sering digunakan untuk menjelaskan isu-isu hubungan internasional oleh aktor-aktor regional. Sebagaimana Duchacek menjelaskan dalam Takdir, 2013 terkait tiga klasifikasi paradiplomasi, yaitu:

1. *Transholder Paradiplomacy*, mengacu pada hubungan kelembagaan, formal atau informal antara pemerintah daerah di negara-negara tetangga yang berbeda tetapi secara geografis berdekatan.
2. *Transregional Paradiplomacy* yaitu hubungan diplomatik yang dilakukan oleh pemerintah daerah di negara yang berbeda dan tidak memiliki perbatasan langsung, tetapi negara tempat kedua pemerintah tersebut berada berbatasan langsung dengan wilayah yang sama.
3. *Global Paradiplomacy* yaitu hubungan diplomatik yang dilakukan oleh pemerintah regional dari negara yang berbeda, wilayah yang berbeda, belahan dunia yang berbeda.

Merujuk dengan apa yang dijelaskan Duchacek diatas, aktifitas yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung masuk dalam klasifikasi *Global Paradiplomacy*. Melaui MUFPP, Kota Bandung bersama dengan pemerintah kota-kota di seluruh dunia membuka relasi kerjasama dan berkomitmen dalam rangka mengembangkan sistem pangan yang berkelanjutan serta berbagi ide dan inovasi terbaru dalam pengembangan sistem pangan dan penanganan masalah pangan di daerah urban.

Dalam penelitian sebelumnya terkait Paradiplomasi, yaitu "Paradiplomasi Melalui Kerjasama *Sister City*: Upaya Untuk Meningkatkan Potensi Industri Pariwisata di Kabupaten Sumenep" (Mansyur, 2021) mengangkat pengembangan potensi industri pariwisata Sumenep menjadi obyek wisata yang berstandar nasional melalui kerjasama *sister city*. Sumenep memiliki potensi sumberdaya pariwisata yang dominan, terutama sumberdaya pesisir dan lautan. Sumenep memiliki sumberdaya perikanan laut, mangrove, terumbu karang, padang lamun, rumput laut, dan bahan-bahan bioaktif (minyak bumi, gas, mineral, pasir, dan bahan tambang) serta berbagai macam energi kelautan (gelombang, pasang surut, dan angin). Sumenep juga memiliki kekayaan budaya ikonik yaitu keris yang menurut catatan UNESCO, empu keris terbanyak di Indonesia yaitu sekitar 652 empu pada tahun 2018. Sebelumnya, Sumenep belum melakukan aktivitas

paradiplomasi. Dengan menggunakan konsep sister city merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan potensi pariwisata di Sumenep. Dalam penelitian Mansyur ini, penelitian mencoba menggambarkan bagaimana kerjasama *sister city* apabila dilakukan di Sumenep.

Adapun penelitian yang berjudul "Pelaksanaan Paradiplomasi Pemerintahan Kota Medan Dalam Kerjasama *Sister City* Kota Dengan Kota Gwangju dan Ichikawa" (Yasir Pautan Daulay, 2019) membahas pelaksanaan paradiplomasi pemerintahan Kota Medan dengan Kota Gwangju dan Ichikawa dalm berbentuk kerjasama *sister city* juga yang telah memiliki MoU dan telah terlaksana hingga 20 tahun lebih. Dalam kerjasama *sister city* dengan Kota Gwangju dan Ichikawa Pemerintah Kota Medan berfokus pada empat bidang yakni Pendidikan dan Pelatihan, Ekonomi Investasi, Kepemudaan, dan Kebudayaan. Pertukaran pelajar, pelatihan, investor dan pengiriman tim kesenian merupakan hasil dari implementasi Paradiplomasi di Kota Medan.

Terdapat juga penelitian berjudul "*Menuju Surabaya Green City* Melalui Kerjasama Kota Kembar Surabaya-Kitakyushu" (Fany Widiana dan Ario Bimo, Utomo, 2021) mengenai kerjasama yang dilaksanakan oleh Kota Surabaya dan Kota Kitakyushu, dimana kedua kota telah aktif melakukan kerjasama pada bidang lingkungan dari tahun 1997 saat penandatanganan *Joint Declaration of The Kitakyushu Conference on Environmental Cooperation among Cities in The Asian Region*. Kemudian kedua kota memutuskan untuk melakukan kerjasama ke jenjang yang lebih tinggi dan lebih spesifik yaitu kerjasama paradiplomasi "*Green Sister City of* Surabaya-Kitakyushu yang diresmikan dengan penandatanganan MoU oleh kedua kota di Surabaya pada tahun 2012. Kerjasama ini dilatarbelakangi oleh masalah lingkungan yang dialami Kota Surabaya sebagai salah satu daerah urban yang memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Permasalahan lingkungan yang dihadapi oleh kota Surabaya salah satunya adalah permasalahan sampah, kurangnya lahan hijau, dan melihat pada sejarahnya Kota Surabaya pada tahun 2000 mengalami banjir sampah akibat kurangnya Lahan Pembuangan Akhir (LPA). Surabaya memiliki kepentingan untuk mempelajari cara Kitakyushu dalam mengolah sampah, sedangkan kepentingan Kitakyushu dalam kerjasama *sister city* ini adalah menjadi pusat Asia untuk masyarakat rendah karbon.

Dari penelitian Mansyur obyek yang dibahas adalah peningkatan dan pengembangan potensi pariwisata yang dimiliki Sumenep sehingga menjadi obyek wisata yang berstandar nasional melalui media *sister city.* Adapun riset yang dilakukan oleh Daulay pelaksanaan pelaksanaan paradiplomasi pemerintahan Kota Medan dengan Kota Gwangju dan Ichikawa dalam juga dalam berbentuk kerjasama *sister city* terkait Pendidikan dan Pelatihan, Ekonomi Investasi, Kepemudaan, dan Kebudayaan. Sedangkan penelitan Widiana dan kawan-kawan mengenai pelaksanaan kerjasama Kota Surabaya dan Kota Kitakyushu dalam mewujudkan kebijakan *Surabaya Green City* melalui *sister city*.

Dalam penelitian ini, Kota Bandung bergabung dalam MUFF sebagai upaya untuk mencari solusi permasalahan terkait pengembangan sistem pangan

yang berkelanjutan yang banyak terjadi di daerah urban berdasarkan kerangka kerja MUFF. MUFF adalah media Paradiplomasi yang memiliki jejaring kota-kota dunia yang peduli pada keberlanjutan sistem pangan. Kota yang bergabung berkomitmen untuk mengembangkan sistem panga yang inklusif, tangguh, aman, beragam dan berkelanjutan, untuk menyediakan dan melindungi keanekaragaman hayati dengan beradaptasi dengan dampak perubahan iklim, dan untuk mendukung kota yang ingin mengembangkan sistem pangan perkotaan yang lebih berkelanjutan dan pertukaran praktik terbaik (Calori dkk., 2022). Dari penelitian Mansyur, Widiani, dan Daulay menjelaskan kerjasama yang dilakukan lebih mengedepankan pendekatan *sister city*, dimana kota yang diajak kerjasama hanya sebagai mentor dalam mengangkat dan menyelesaikan permasalahan kota di Sumenep, Medan, dan Surabaya. Adapun praktek paradiplomasi yang dilakukan kota Bandung bergabung dalam MUFF untuk mengatasi permasalahan *urban effect* seperti masalah ketahanan pangan sudah tepat dikarenakan kerangka kerjasama dalam lebih jelas dan terukur berdasar tujuh komitmen yang ditandatangani para walikota dalam Pakta Milan pada tahun 2015.

Peran *Milan Urban Food Policy Pact* (MUFPP) dalam Pengembangan Sistem Pangan Kota Bandung

Milan Urban Food Policy Pact (MUFPP) terbentuk bermula saat keprihatinan atas kegagalan sistem pangan di kota Milan, Italia. Dari kejadian tersebut, Kota Milan pada 2014 memulai kajian mengenai sistem pangan lokal dengan berfokus pada daur pangan, mulai dari konteks sampai dengan para pelaku dalam sistem pangan. Hasil kajian tersebut kemudian diperbincangkan dalam konsultasi publik yang melibatkan 700 pemangku kepentingan yang menghasilkan dirumuskan kebijakan pangan perkotaan yang komprehensif. Strategi kemudian menemukenali lima bidang intervensi, dengan prioritas utama memerangi limbah pangan (Calori, 2022).

Berpijak dari hasil kajian sistem pangan lokal di Milan pada 2014, wali kota Milan Giuliano Pisapia yang menjabat pada tahun 2011-2016, memprakarsai jejaring kota-kota dunia yang peduli pada keberlanjutan sistem pangan. Kemudian pada tahun 2015 Milan menjadi tuan rumah pada agenda EXPO 2015 sebuah pameran dunia bertajuk *"Feeding the Planet, Energy for Life*" yang menghadirkan 145 negara dan 50 lembaga internasional. Pada kesempatan itu kemudian kota Milan meresmikan Pakta Milan (MUFPP).

Kota yang bergabung berkomitmen untuk mengembangkan sistem pangan yang inklusif, tangguh, aman, beragam dan berkelanjutan, untuk menyediakan dan melindungi keanekaragaman hayati dengan beradaptasi dengan dampak perubahan iklim, dan untuk mendukung kota yang ingin mengembangkan sistem pangan perkotaan yang lebih berkelanjutan dan pertukaran praktik terbaik.

Tujuh komitmen yang ditandatangani para walikota dalam Pakta Milan meliputi (Widianarko, 2019):

1. Menyediakan makanan yang sehat dan terjangkau untuk semua, berdasarkan kerangka kerja berbasis hak asasi manusia yang meminimalkan limbah dan melestarikan keanekaragaman hayati dengan beradaptasi dan mengurangi dampak perubahan iklim untuk mengembangkan sistem pangan yang inklusif, tangguh, aman, beragam, dan berkelanjutan.

2. Mempromosikan koordinasi kota antarsektor di tingkat masyarakat, mengintegrasikan pertimbangan kebijakan pangan kota dengan pertimbangan sosial dan ekonomi, dan bekerja untuk mengintegrasikannya dengan kebijakan, program, dan inisiatif lingkungan, ketahanan pangan, dan pencegahan limbah.
3. Mengembangkan koordinasi antara kebijakan dan program gizi masyarakat dan kebijakan dan proses lokal, nasional, regional dan internasional yang relevan.
4. Melibatkan beragam sektor pengembangan sistem pangan (termasuk tokoh masyarakat, organisasi teknis dan akademis, masyarakat sipil, petani kecil dan sektor swasta) dalam perumusan, implementasi dan evaluasi semua kebijakan, program dan inisiatif pangan.
5. Meninjau dan ubah kebijakan, rencana, dan peraturan kota untuk mempromosikan sistem pangan yang adil, berkelanjutan, dan berkelanjutan.
6. Mengunakan kerangka aksi sebagai titik awal bagi setiap kota untuk mengembangkan sistem pangannya dan berbagi pembangunan dengan kota-kota yang berpartisipasi, pemerintah nasional dan organisasi internasional yang sesuai.
7. Mengajak kota-kota lain untuk terlibat dalam aksi kebijakan pangan ini.

Pakta Millan ini telah ditandatangani 100 kota dunia pada 15 Oktober 2015 di Milan saat peluncuran pertamanya. Karena sifatnya yang terbuka, jumlah kota yang bertanda-tangan terus bertambah, sampai saat ini terdapat 240 kota yang bergabung dengan total populasi 400 juta (milanurbanfoodpolicypact.org, 2022). Setiap Anggota dalam MUFPP perlu untuk mengembangkan sistem pangan yang berkelanjutan sesuai dengan komitmen yang telah disepakati bersama. Dalam MUFPP terdapat kerangka kerja dan kebijakan dalam pengembangan sistem pangan berkelanjutan yang direkomendasikan. Terdapat kebijakan dan kerangka kerja dalam pengembangan sistem pangan berkelanjutan yang direkomendasikan dalam MUFPP dalam pengembangan sistem pangan di setiap kota yang bergabung di dalamnya. Milan Pact mendefinisikan sistem pangan berkelanjutan sebagai sistem pangan yang inklusif, tangguh, aman, beragam, ramah iklim dan sehat. Maka MUFPP memberikan kerangka kerja yang direkomendasikan untuk bertindak dalam tujuan pengembangan sistem pangan berkelanjutan bersifat sukarela. Tujuannya untuk memberikan opsi strategis bagi kota-kota yang bertujuan untuk mencapai sistem pangan yang lebih berkelanjutan dalam 37 kerangka kerja yang direkomendasikan MUFPP yang di dasari pada 6 kategori kebijakan yang tertulis dalam MoU yang telah disepakati antara Kota Bandung dan *Milan Urban Food Policy Pact*.

Awal permulaan dari terbentuknya perjanjian MUPP adalah kegagalan sistem pangan perkotaan di Milan, dimana ini sesuai dengan pendapat yang di berikan oleh Haggard & Simmons yang mengatakan bahwa kepentingan timbul karena adanya ketidakpuasan, Maka dalam hal ini Kota Milan kemudian belajar dari sebuah kegagalan yang dialami dengan membuat suatu perjanjian internasional yang bertujuan untuk mengembangkan sistem pangan di berbagai kota di seluruh dunia, sehingga berbagai kota di seluruh dinia dapat menjadi kota yang mandiri pangan dan masyarakat dapat tercukupi pangannya. Sehingga para pemangku kepentingan pada tahun 2015 yang hadir dalam EXPO 2015 tertarik

dan bergabung di dalamnya. Kota – kota yang bergabung dalam perjanjian internasional MUFPP ini kemudian berlandaskan pada MUFPP yang memuat nilai, norma dan aturan yang memuat kepentingan aktor yang bergabung didalamnya.

Sebagai sebuah perjanjian internasional yang melahirkan sebuah prosedur dan aturan yang eksplisit semua harapan para anggota berkumpul dalam gerakan bersama untuk mengembangkan sistem pangan berkelanjutan. Kerangka kerja dan kebijakan yang dituangkan dalam *MoU* dibangun berdasarkan pengalaman langsung dari kota-kota yang berpartisipasi dan memperhitungkan berbagai komitmen, tujuan, dan target yang relevan. Opsi-opsi tersebut telah diorganisasikan ke dalam kelompok-kelompok tematis, mereka harus dilihat sebagai titik masuk menuju pencapaian tujuan bersama dari sistem pangan berkelanjutan. Kota-kota dapat memilih, mengadaptasi, dan mengelompokkan opsi ke dalam pedoman sebagaimana diperlukan untuk menyesuaikan dengan situasi masing-masing kota. Sejak tahun 2015 hingga 2022 saat ini tercatat 370 bentuk pengembangan sistem yang telah diciptakan oleh kota-kota yang bergabung dalam MUFPP.

Paradiplomasi Kota Bandung Melalui MUFPP

Kota Bandung saat ini telah menjadi kota yang sangat maju dengan industrialisasi yang terjadi. Bersamaan dengan hal itu, berkurangnya lahan pertanian menjadi permasalahan yang dihadapi Kota Bandung akibat proses urbanisasi yang terjadi. Akibatnya pertambahan jumlah penduduk serta terjadinya alih fungsi lahan menjadi pabrik, perumahan dan juga *Mall* memberikan Kota Bandung tugas yang cukup penting untuk memperhatikan bagaimana keberlangsungan dan masa depan kecukupan pangan di Kota Bandung. Kekhawatiran terhadap pasokan pangan di masa yang akan datang, faktanya hampir 2,5 juta penduduk Kota Bandung saat ini dicukupi kebutuhan pangannya dari luar kota. Hal ini melatarbelakangi langkah Pemerintah Kota Bandung dalam mengembangkan sistem pangan yang berkelanjutan. Data Distan Kota Bandung menunjukkan bagaimana lahan persawahan berkurang dengan cepat. Pada 2017, luas lahan persawahan di Kota Bandung mencapai 720 hektare (ha) dan pada 2018 berkurang jadi 623 ha. Disamping itu, untuk memenuhi kebutuhan pangan 2,4 juta warganya, Pemkot Bandung memasok 96% bahan pangan dari luar kota. Sebagai kota metropolitan, Kota Bandung minim lahan pertanian. Dari fakta ini kita dapat melihat bahwa Pemerintah Kota Bandung perlu untuk mengembangkan sistem pangan berkelanjutan, karena semakin berkurangnya lahan pertanian akan berakibat pada bagaimana Kota Bandung dapat menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakatnya, jika daerah yang mensuplai pangan ke Kota Bandung di kemudian hari mengalami permasalahan ketersediaan juga maka daerah tersebut pasti akan lebih mengutamakan daerahnya terlebih dahulu dibanding kota atau daerah lain (Kusnawan, 2019), (Wulan, 2022).

Keseriusan Pemerintah Kota Bandung dalam pengembangan sistem pangan berkelanjutan diwujudkan dengan ikut bergabung dalam MUFPP pada 06 Agustus 2020. Pemerintah Kota Bandung dan berbagai kota di seluruh dunia yang bergabung dalam MUFPP dapat Bersama-sama mengembangkan sistem pangan yang berkelanjutan dan juga saling bertukar konsep penanganan pangan yang di kembangkan di masing-masing kota. Dhea, sebagai salahsatu staf Bagian

Kerjasama Luar Negeri RI menjelaskan bahwa Kota Bandung menjadi kota pertama di Asia tenggara yang menjadi anggota dalam MUFPP.

Kota Bandung telah bergabung dalam MUFPP sejak tahun 2020 dan saat ini telah memasuki tahun ketiga bergabungnya Kota Bandung sebagai kota pertama di Asia Tenggara yang bergabung dalam MUFPP. Kota-kota yang telah bergabung dalam MUFPP berkomitmen untuk mengembangkan sistem pangan berkelanjutan bersama kota lainnya dari berbagai kawasan dan negara yang bergabung di dalamnya. MUFPP memiliki Kebijakan dan Kerangka Kerja yang direkomendasikan dalam pengembangan sistem pangan. Kerangka kerja atau rekomendasi action dalam MUFPP tersebut dapat dipilih untuk menangani permasalahan pangan maupun dalam pengembangan sistem pangan berkelanjutan di kota-kota yang telah bergabung di dalamnya dengan menyesuaikan dengan kondisi, permasalahan dan kemampuan dari kota tersebut. Kota Bandung sendiri mengalami permasalahan pasokan pangan, yang mana Kota Bandung masih bergantung dengan daerah luar dalam hal kebutuhan pangan, ini diakibatkan oleh terjadinya alihfungsih lahan. Selain itu permasalahan yang dihadapi oleh Kota Bandung yaitu tingginya jumlah sampah makanan yang dihasilkan sekitar 1.600 Ton setiap tahunnya seperti yang dikatakan Agus Permana, Staf Pemkot Bandung dalam wawancara.

Adapun tujuan bergabungnya Kota Bandung dalam MUFPP adalah untuk lebih mengembangkan sistem pangan yang berkelanjutan dengan harapan bahwa Kota Bandung dapat menjadi kota yang mandiri pangan, melalui sistem pangan yang berkelanjutan juga diharapkan dapat memberikan solusi dalam meminimalisir sampah makanan. Melalui sebuah perjanjian internasional yang didalamnya kemudian memberikan rekomendasi aksi dalam pengembangan sistem pangan berkelanjutan, bersama dengan kota dari berbagai kawasan dan negara yang berbeda namun satu dalam tujuan mengembangakan sitem pangan berkelanjutan dan memiliki niat, keprihatinan mengenai pangan, maka para anggota dapat bertukar informasi dan konsep sistem pangan yang lebih berkelanjutan.

Kegiatan yang dilakukan Kota Bandung ini merupakan salah satu bentuk dari paradiplomasi, dimana Kota Bandung sebagai *sub-state actor* bergabung dalam sebuah perjanjian internasional dan bekerjasama dengan kota - kota lain dari berbagai negara untuk mengembangkan sistem pangan yang berkelanjutan. Kota atau aktor *sub-state* yang melakukan praktek Paradiplomasi bertujuan untuk menangani permasalahan kota atau daerahnya dengan itu setiap daerah yang sesuai dengan kepentingannya. Kota Bandung sendiri masuk dalam sebuah perjanjian internasional yaitu MUFPP bertujuan untuk mengembangkan sistem pangan yang berkelanjutan yang diharapkan dengan masuknya dalam MUFPP, maka Kota Bandung dapat meningkatkan produksi pangan sehingga dapat menjadi kota yang mandiri pangan dan tidak bergantung dengan daerah lain. Dari fenomena ini jika dilihat mengunakan konsep *micro-diplomacy* dari Ivo Duchacek terdapat 3 konsep. Kerjasama yang dilakukan oleh Kota Bandung ini termasuk dalam konsep *global paradiplomacy* yaitu hubungan diplomasi yang dilakukan pemerintah daerah yang berbeda negara, dari kawasan yang berbeda, dari berbagai belahan dunia. Dalam MUFPP terdapat berbagai kota dari Kawasan dan negara yang berbeda. Contohnya seperti Kota Bandung, Indonesia dari kawasan Asia Pasifik, Kota Copenhagen, Denmark dari kawasan Eropa, Kota Bamako, Mali dari

kawasan Afrika, Kota Cordoba, Argentina dari kawasan Amerika Selatan, dan masih banyak lagi kota dari berbagai kawasan dan negara lainnya, total dari angota MUFPP saat ini yaitu 240 kota.

Implementasi Pengembangan Sistem Pangan Berkelanjutan Kota Bandung Melaui MUFPP

Dalam implementasi aksi pemngembangan sistem pangan berkelanjutan di Kota Bandung, Pemerintah Kota Bandung membuat program Bandung *Food Smart City* yang bertujuan membuat Kota Bandung menjadi kota cerdas pangan yang sebagian besar kegiatannya pada edukasi terkait pentingnya menghargai pangan menjadi hal yang penting untuk diajarkan kepada masyarakat. Bandung *Food Smart City* ini sebagai salah satu bagian dari Implementasi dari MUFPP. Program - program tersebut antara lain, Kampanye, *Urban Farming*, dan *Food Sharing* dalam memenuhi ketersediaan pangan (bandungfoodsmartcity.org, 2022).

Kota Bandung mengadopsi beberapa action yang sesuai dengan rekomendasi action yang ada dalam MUFPP dan juga meningkatkan program atau upaya yang sudah ada sebelumnya sesuai pada rekomendasi akasi dari MUFPP. Berikut Implementasi MUFPP dalam pengembangan sistem pangan berkelanjutan di Kota Bandung Sejak tahun 2020 - 2022:

1. Buruan Sehat Alami, dan Ekonomis (SAE)

   Program ini sesuai dengan kategori kebijakan nomor 4 yaitu produksi makanan yang mana dalam program ini Kota Bandung telah mengimplementasikan rekomendasi aksi atau kerangka kerja dalam MUFPP no.22 - no.26 yaitu memperkuat produksi dan pemrosesan pangan perkotaan dan pinggiran kota berdasarkan pendekatan berkelanjutan dan mengintegrasikan pertanian perkotaan dan pinggiran kota ke dalam rencana ketahanan kota. Kota Bandung yang terus mengalami pengurangan lahan pertanian dapat mengambil langkah ini, namun para pemangku kepentingan menyelaraskan program Buruan Sehat, Alami dan Ekonomis (SAE) yang dibuat dengan kondisi pinggiran perkotaan berdasarkan pendekatan berkelanjutan. Program ini merupakan program *urban farming* dengan memanfaatkan lahan kosong di sekitar pekarangan rumah warga, paling tidak dapat memenuhi pangan satu keluarga. Program ini sesuai dengan kebijakan nomor 4 MUFPP, dimana Buruan SAE ini diharap dapat memperkuat produksi dalam kota, dengan memanfaatkan pekarangan rumah yang kosong untuk mengolahnya menjadi bermanfaat dengan penanaman pangan.

   Sejak bergabung dengan MUFPP pada 06 Agustus 2022 Kota Bandung mulai menunjukkan keseriusannya dalam pengembangan sistem pangan berkelanjutan dengan meluncurkan program Buruan SAE yaitu bentuk *urban farming* yang sangat cocok dengan kondisi Kota Bandung yang sudah padat. Buruan SAE diluncurkan pada bulan september 2020 setelah satu bulan bergabung dengan MUFPP. Jumlah titik lokasi buruan SAE di Kota Bandung setiap tahunnya mengalami peningkatan. Berikut tabel yang menunjukkan angka jumlah lokasi dari Buruan SAE.

Tabel 1. Peningkatan Jumlah Titik Lokasi Buruan SAE di Kota Bandung

No.	Tahun	Jumlah Titik Lokasi

1.	2020	194 Lokasi
2.	2021	234 Lokasi
3.	2022	335 Lokasi

Sumber dari berbagai berita *online*:
bandung.go.id, detikNews, dan detikJabar

Sejak resmi dikeluarkan pada September 2020, dimana saat peresmiannya terdapat 7 lahan Buruan SAE, lalu kemudian pihak Pemerintah Kota Bandung pada 2020 memberikan suntikan intervensi terhadap 60 titik pembuatan Buruan SAE, dan di akhir tahun 2020 terdapat 194 lokasi yang titik Buruan SAE. Di tahun 2021 Kota Bandung menargetkan akan menambah 40 titik. Yang pada akhir tahun 2021 total lokasi mencapai 234 titik. Namun ternyata pada tahun 2022 telah tercatat 335 titik Buruan Sae di Kota Bandung.

Buruan SAE di RW 4 Kel. Cipaganti Kec. Coblong, atau yang dikenal sebagai Buruan SAE Seribu karena luas lahan 100 m2 yang terus di kembangkan dan diperluas hingga saat ini, Buruan SAE ini adalah salah satu titik Buruan SAE di Kota Bandung. Buruan SAE seribu memiliki 26 anggota dan di ketua kelompok oleh Wahyu. Kelompok Buruan SAE ini memanfaatkan lahan pinggir jalan RT 7 dan juga diatas sungai yang melewati pemukiman warga. Namun kelompok Buruan SAE ini sendiri masih pada lingkup penanaman sayur dan perikanan. Lokasi lahannya sangat strategis terletak di tengah – tengah pemukiman warga sehingga sangat cocok untuk dijadikan sebagai tempat edukasi selain untuk mencapai tujuan utamanya yaitu menciptakan ketahanan pangan mulai dari tingkat terkecil.

Distribusi bantuan sarana dari Dinas Pangan dan Pertanian (DPP) Kota Bandung Buruan SAE dilaksanakan secara bertahap yang dimulai pada tanggal 28 Maret 2022. Adapun bantuan sarana yang diberikan yaitu berupa bibit dan benih, media tanam, benih ikan lele dan sarana budikdambernya, Otega, ayam petelur dan lain – lain. Penataan lahan Buruan SAE Sajuta Seratus dilakukan secara bertahap mulai dari penataan lahan hingga penataan lokasi per komoditinya. Pada tahun berikutnya diharapkan Buruan SAE Sajuta Seratus dapat menjadi pusat edukasi pertanian bagi masyarakat RW 4 Kel. Cipaganti khususnya maupun masyarakat Kota Bandung pada umumnya.

Kota Bandung mengirimkan praktik Buruan SAE pada *Milan Pact Talks* yang dilakukan secara online. Sebagai anggota dalam MUFPP Kota Bandung wajib mengikuti kegiatan ini. Dalam agenda ini, kota yang bergabung dapat saling bertukar informasi mengenai pengembangan sistem pangan. *Milan Pact Talks* merupakan pengganti dari agenda tahunan MUFPP yaitu *Milan Pact Awards* yang setiap tahunnya dilaksanakan namun karena pandemi covid-19 maka MUFPP merubah agenda tersebut dalam sistem during dengan nama Milan Pact Talks.

Setelah dikirim dalam agenda *Milan Pact Talks*, Pada 1 November 2021 MUFPP membuat agenda yaitu Global Forum *Milan Urban Food Policy Pact* (MUFPP). Dimana dalam agenda tersebut Buruan SAE Kota Bandung dipresentasikan dan mendapat surat penghargaan dari Kota Milan dan Barcelona setelah mempresentasikan program Buruan SAE di depan 500

partisipan dari 150 kota seluruh dunia dari latar belakang ilmuwan, agen internasional, dan organisasi masyarakat sipil (Tribunjabar.id. 2021)

Program ini sangat cocok dengan Kota Bandung dimana sebelumnya Kota Bandung mendapatkan suplai pangan dari luar kota dikarenakan alih fungsi lahan yang telah berubah menjadi perumahan, mall dan pabrik. sehingga Kota Bandung membuat Buruan SAE yang sesuai dengan kondisi Kota Bandung dimana konsep urban farming ini yaitu memanfaatkan halaman kosong untuk dimanfaatkan dalam memproduksi pangan minimal dapat memberikan makan satu keluarga. Program Buruan SAE ini telah mengalami perkembangan dimana hasil pangan dari Buruan SAE ini telah dijual dan dapat memberikan keuntungan ekonomi bagi masyarakat. Program ini pula menjadi wujud dari di upaya pengaplikasian poin ke 2 dalam SGDs yaitu mengakhiri kelaparan, karena dengan program Buruan SAE ini diharapkan dapat menjamin makanan bagi masyarakat setempat sehingga Kota Bandung terhindar dari masalah kelaparan.

Gambar 1. Peta Buruan SAE di Wilayah Kota Bandung

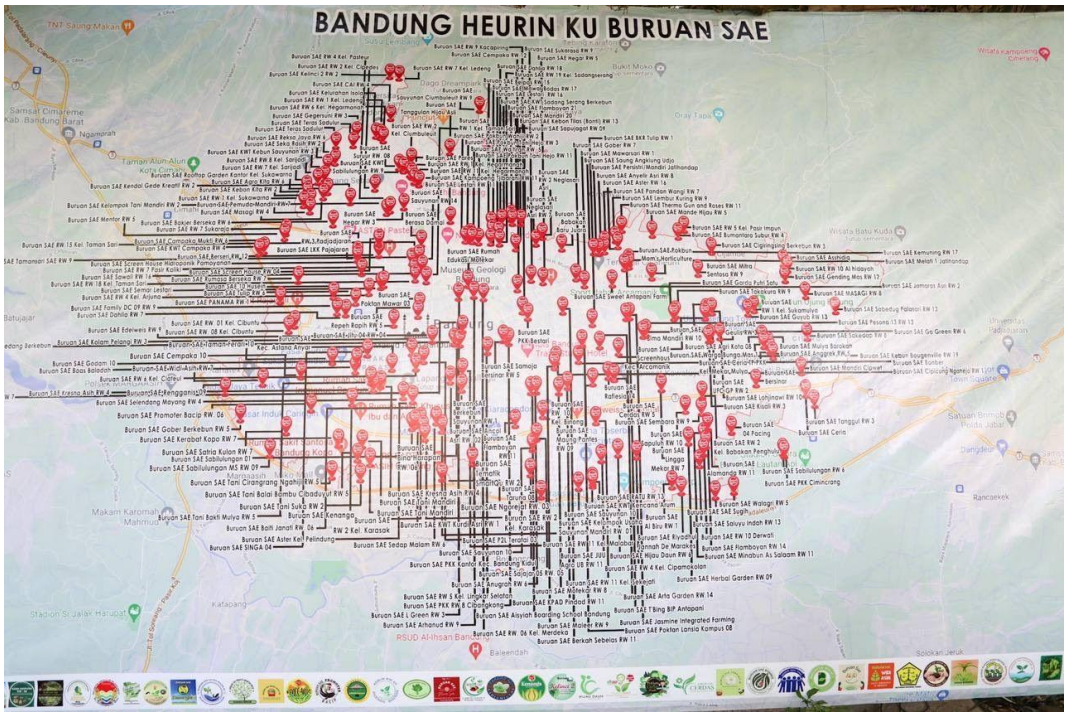

Sumber: inilahnews.com

Pencapaian dari program Buruan SAE ini telah sampai pada level internasional dimana pada agenda forum regional U20 Agustus 2022 di Kota Bandung, pada agenda hari kedua yaitu kunjungan pada lokasi Buruan SAE dimana berbagai negara mengapreseasi dan menjadikannya sebagai tempat penelitian atau studi banding, salah satunya adalah Kota Roma, Italia (zonabandung.com. 2022). Hingga Agustus 2022 terdapat 300 kelompok Buruan Sae yang bisa membuat masyarakat mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan (republika.co.id, 2022). Malah *Milan Urban Food Policy Pact* (MUFPP) tertarik untuk mengadopsi dan menyebarkan Buruan Sae sebagai konsep *urban farming* ala Kota Bandung untuk diterapkan di berbagai

negara di dunia. Hal ini diperkuat oleh pernyataan *Head of MUFPP* Filippo Gavazzeni dengan mengapresiasi gerakan yang dilakukan di Kota Bandung dalam penyediaan lahan untuk ketahanan pangan. Dia menilai Kota Bandung mampu memenuhi kebutuhan pangan sendiri di wilayah masing-masing.

2. Program Kurangi, Pisahkan, Manfaatkan (Kang Pisman)

Program ini sesuai dengan kategori kebijakan nomor 6 yaitu sampah makanan yang mana dalam program ini Kota Bandung telah mengimplementasikan rekomendasi aksi atau kerangka kerja dalam MUFPP no.34 - no.37 yaitu Para pemimpin kota dan pembuat kebijakan yang ingin mengurangi limbah makanan, serta mengolahnya dengan cara yang lebih berkelanjutan dapat mengadopsi pendekatan ekonomi sirkular.

Program Kurangi, Pisahkan, Manfaatkan (Kang Prisman) sesuai dengan kebijakan MUFPP nomor 6, dimana program Kang Pisman ini bertujuan untuk mengurangi limbah makanan dan kemudian dikelola dan memiliki nilai. Program ini bersifat masif dan dilaksanakan oleh seluruh komponen masyarakat, dimana masyarakat dapat mengolah sampahnya secara mandiri. Dengan metode yang dipilih sendiri dan disesuaikan dengan sumber sampah, sarana dan pengetahuan yang dimiliki masing-masing masyarakat. Pengelolaan sampah ini dengan melibatkan masyarakat dalam memisahkan sampah sebelum di proses dan nantinya diintegrasikan pada pertanian ketika telah diolah menjadi pupuk yang bermanfaat.

Berdasarkan data dari Sistem informasi pengelolaan sampah Nasional Kota Bandung pada tahun 2019 menghasilkan sampah makan 42,00 % lalu pada tahun 2020 meningkat menjadi 43,00 % dan pada tahun 2021 meningkat lagi menjadi 44;52 % Dalam hal sampah makanan Kota Bandung sejak tahun 2019 hingga 2021 selalu mengalami peningkatan sampah makanan (sipsn.menlhk.go.id 2022). Maka berdasarkan fakta tersebut maka dibuatlah sebuah program yaitu Kurangi Pisahkan, Manfaatkan (Kang Pisman) untuk menangani permasalahan sampah makan di Kota Bandung. Program Kang Pisman ini telah ada sejak 4 tahun sejak tahun 2019, Namun berdasarkan data sebelumnya dapat dilihat bahwa program ini belum dapat menurunkan jumlah sampah makanan di Kota Bandung, Faktanya sejak tahun 2019 - 2021 sampah makanan terus mengalami kenaikan. Hal ini karena kurangnya partisipasi dari masyarakat pada tahun 2021.

Namun pada tahun 2022 ini mengalami sedikit perkembangan, program ini berhasil mengurangi sampah makanan sekitar 2,5 ton di daerah Dago Bengkok melalui fasilitas TPS-3R, masyarakat mengubah sampah menjadi memiliki nilai lagi, dengan mengubah sampah organik menjadi pupuk. Ketua Kelompok Swadaya Mandiri TPS 3R Hedy Wibowo mengatakan, berkat kemandirian warga dalam mengolah sampah dari rumah, sebanyak 40 persen jumlah sampah tidak dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Program ini sejalan dengan poin SGDs nomor 12 tentang konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, dimana melalui program ini masyarakat dapat memiliki sifat bertanggung jawab atas sampah yang dihasilkan.

Program ini memang telah ada sebelum Kota Bandung bergabung dalam MUFPP. Namun program ini tidak terlalu memberikan hasil yang signifikan dikarenakan kurangnya respon masyarakat terkait hal ini. Setelah bergabung dalam MUFPP Kota Bandung kini lebih gencar dalam menangani

permasalahan sampah makanan di Kota Bandung dengan peningkatan sosialisasi program Kang Pisman. Kota Bandung juga memasukan program Kang Pisman dalan Tujuan regionalnya dalam MUFPP yaitu mempromosikan program ini.

3. Kampanye edukasi mengenai pangan

Program ini sesuai dengan kategori kebijakan nomor 6 yaitu sampah makanan yang mana dalam program ini Kota Bandung telah mengimplementasikan rekomendasi aksi atau kerangka kerja dalam MUFPP no.35 yaitu Meningkatkan kesadaran akan kehilangan dan pemborosan pangan melalui acara dan kampanye yang ditargetkan, mengidentifikasi titik pusat seperti Lembaga Pendidikan, pasar masyarakat, toko perusahaan dan inisiatif solidaritas atau lingkaran ekonomi lainnya.

Berdasarkan rekomendasi aksi dari MUFPP maka Kota Bandung kemudian membuat kampanye mengenai panga ini memberikan edukasi terhadap masyarakat mengenai pentingnya menghargai pangan dengan mengurangi pangan yang terbuang. hal ini bertujuan agar sampah makanan yang dihasilkan di Kota Bandung dapat berkurang. Kampanye yang dilakukan diberi nama Food Racing, Kampanye melalui games yang diberi nama "*Food Racing*" ini dilakukan ke beberapa sekolah di Kota Bandung yaitu, SMAK BPPK, SMPN 2 Bandung dan SMA Trinitas dengan jumlah audiens rata-rata melebihi 300 anak. Permainan ini bertujuan memberikan penyadaran terhadap kaum muda (kaum millennial) bahwa belanja makanan itu harus bijak dan memberikan penyadaran juga bahwa makanan yang tersisa di piring atau minuman yang tersisa di gelas minuman kalian itu berdampak buruk terhadap lingkungan sekitar dan bahkan berdampak buruk bagi bumi. Setelah permainan selesai, maka peserta diajak berkumpul, kemudian tim melakukan *camping* dan bertanya pendapat peserta atau melakukan evaluasi mengenai apa yang mereka rasakan setelah bermain "*food racing*". Peserta mulai sadar ternyata gaya hidup yang dijalankan selama ini salah dan mulai berkomitmen untuk merubah gaya hidup yang sebelumnya *food waste* menjadi *anti food waste* (bandungfoodsmartcity.org 2022).

Kampanye ini dilakukan untuk menanamkan edukasi mengenai sampah makanan yang selalu meningkat akibat dari perbuatan tidak bertanggung jawab dari manusia itu sendiri. Maka generasi muda perlu untuk diajarkan sejak dini mengenai pentingnya untuk menghargai makanan dan tidak menyisakan makanan. Sehingga dari kegiatan kampanye ini diharapkan kedepannya dapat mengurangi jumlah hasil dari sampah pangan.

4. Badami

Program ini sesuai dengan kategori kebijakan nomor 3 yaitu keadilan sosial dan ekonomi yang mana dalam program ini Kota Bandung telah mengimplementasikan rekomendasi aksi atau kerangka kerja dalam MUFPP no.17 dan no.18 yaitu mendorong, mendukung kegiatan ekonomi sosial dan solidaritas, memberikan perhatian khusus pada kegiatan terkait makanan, mendukung mata pencaharian berkelanjutan untuk populasi yang terpinggirkan di berbagai tingkat rantai makanan dan fasilitas akses ke makanan yang aman dan sehat di daerah perkotaan dan pedesaan. Pada poin no.18 juga direkomendasikan aksi untuk melakukan promosi jaringan dan mendukung

kegiatan akar rumput (seperti dapur makanan masyarakat, pantry sosial, dll) yang menciptakan inklusi sosial dan menyediakan makanan untuk individu yang terpinggirkan.

Berdasarkan rekomendasi aksi yang ada dalam MUFPP maka Kota Bandung saat masa pademi Covid-19 dimana hampir semua lapisan masyarakat terkena dampak ekonomi dari wabah ini. Kota Bandung pada 2021 melalui Forum Badami program *food rescue* yang bertujuan untuk memberi makan pada orang yang membutuhkan atau sering disebut *food sharing* melalui website resmi Badami.

Sistem dari Badami *food sharing* ini yaitu dengan mendeliverikan makanan pada orang yang membutuhkan atau juga dapat dilakukan dengan mendonasikan berupa uang dan selain itu juga dapat dengan melakukan pembelian pada produk UMKM lokal. Tujuan dari program ini adalah agar tidak ada orang yang mengalami kekurangan pangan dan kelaparan.

Program ini juga sesuai dengan rekomendasi aksi nomor 18 yaitu Mempromosikan jaringan dan mendukung kegiatan akar rumput (seperti dapur makanan masyarakat, pantry sosial, dll.) yang menciptakan inklusi sosial dan menyediakan makanan untuk individu yang terpinggirkan. Jika dilihat dalam agenda SDGs maka program ini masuk dalam poin agenda nomor 2 yaitu mengakhiri kelaparan, dimana pada saat pandemic banyak orang yang mengalami permasalahan ekonomi yang berdampak pada pemenuhan kebutuhan pangan pada masyarakat kalangan bawah.

5. Aplikasi Arimbi

Program ini sesuai dengan kategori kebijakan nomor 4 yaitu tata kelolah yang mana dalam program ini Kota Bandung telah mengimplementasikan rekomendasi aksi atau kerangka kerja dalam MUFPP no.5 yaitu mengembangkan dan meningkatkan sistem informasi multi sectoral untuk pengembangan kebijakan dan akuntabilitas dengan meningkatkan ketersediaan, kualitas, cakupan dan manajerial dan pertukaran data yang terkait dengan sistem pangan perkotaan, termasuk pengumpulan data formal dan data yang dihasilkan oleh masyarakat sipil dan litra lainya.

Berdasarkan rekomendasi aksi tersebut maka Kota Bandung dalam Pengimplementasiannya membuat suatu aplikasi yaitu aplikasi Arimbi yang berguna dalam memudahkan masyarakat untuk mengetahui harga pasar pangan. Aplikasi ini dibuat berdasarkan latar belakang bagaimana budaya hidup masyarakat perkotaan sebelum pandemi Covid-19, dimana masyarakat cenderung bergaya hidup mewah dengan pola hidup yang sangat boros seperti memesan makanan jadi dan hangout keluar dan berbelanja makanan yang sangat mahal. Namun pada masa pandemic Covid-19 banyak dari lapisan masyarakat yang dulunya hidup dengan pola hidup seperti itu kini harus beralih pada pola hidup yang lebih hemat dengan cara membeli bahan masak di pasar dan membuat makan sendiri. Kendala yang dialami oleh masyarakat tersebut adalah dimana mereka yang tidak tahun mengenai harga bahan pangan di pasar akan mengalami kesulitan. Dari fakta tersebut maka Pemerintah Kota Bandung membuat sebuah aplikasi yang dinamakan Arimbi.

Arimbi dapat diakses melalui aplikasi di playstore dan juga website resmi Bandung Smart City pada fiture Harga pangan. Aplikasi Arimbi ini berisi tabel

harga dari berbagai komoditas pangan yang mana updetan harga pasar setiap harinya dapat diketahui. Dalam SDGs program ini dapat masuk sebagai perwujudan dari agenda nomor 11 adalah kota dan komunitas yang berkelanjutan, dimana melalui aplikasi Arimbi ini maka dapat dilihat bahwa untuk mempermudah masyarakat dalam melihat harga pasar.

Selain mengimplementasikan kebijakan dan kerangka kerja yang ada dalam MUFPP, Kota Bandung sebagai salah satu kota yang bergabung dalam MUFPP juga wajib untuk ikut berpartisipasi dalam pameran praktik agenda tahunan MUFPP Pact Talk. MUFPP setiap tahunnya menggelar acara tahunan yang diselenggarakan untuk merangsang pertukaran praktik dan pembelajaran antara kota-kota penandatangan. Salah satu tujuan terpenting dari Pakta Kebijakan Pangan Perkotaan Milan (MUFPP), adalah Untuk mendorong kerjasama ini sejak tahun 2016, Kota Milan dan Yayasan Cariplo meluncurkan *Milan Pact Awards* (MPA) untuk mengakui upaya paling kreatif dan memantau kota mana yang mengimplementasikan komitmen yang telah mereka buat ketika mereka bergabung dalam pakta tersebut. Penghargaan tersebut merupakan sarana untuk mendorong aksi, memfasilitasi munculnya praktik terbaik kota MUFPP, menjadikannya nyata bagi masyarakat dengan fungsi menginspirasi aksi kota penandatangan lainnya.

MUFPP pada tahun 2020 membuat edisi khusus *Milan Pact Awards* yaitu *"Milan Pact Talks".* Edisi baru ini dibuat dikarenakan pandemi Covid-19 yang membuat terjadinya batasan untuk membuat acara yang memuat banyak orang sehingga dibuatlah *Milan Pact Talk* dengan mengirimkan 4 video sehubungan dengan tanggapan sistem pangan saat Covid-19. Setelah itu dibuatlah forum dalam mempresentasikan pengembangan pangan dari masing-masing anggota MUFPP. Tujuannya adalah untuk berbagi pengetahuan tentang langkah-langkah yang dilakukan untuk menjawab, mengadaptasi, dan mengurangi guncangan sistem pangan.

Tabel 2. Video Praktek Pengembangan Sistem Pangan di Kota Bandung

NO.	JUDUL VIDEO	URAIAN VIDEO
1.	Buruan SAE	Video Buruan SAE berisi tentang sistem urban farming yang memanfaatkan pekarangan atau halaman yang kosong. Program ini dimaksud untuk memenuhi kebutuhan pangan di Kota Bandung. Buruan SAE terdiri dari beberapa sektor antara lain, ikan, kompos, pembibitan tanaman, sayuran, ternak dan tanaman obat. *Tagline* dari Buruan SAE sendiri adalah Sehat, Alami dan Ekonomis. Program ini sendiri bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana memproduksi pangan sendiri. Keuntungan dari program ini sendiri adalah, yang pertama adalah kesadaran makanan sehat, kedua potensi pasar, dimana masyarakat dapat meningkatkan potensi pasar, ketiga adalah Pendidikan pertanian dan ekowisata, jika banyak masyarakat yang mengimplementasikan program ini mereka dapat mendapatkan pemahaman mengenai pertanian dan ekowisata.dan terakhir adalah dapat menghadirkan

		kegiatan yang positif dan menarik dari kepedulian terhadap tanaman secara langsung. *Channel Youtube:* Milan Urban Food Policy Pact *Link: https://youtu.be/Qnoz8Ym_GuQ*
2.	Badami	Video Badami ini menjelaskan tentang program *food rescue* dimana program ini bertujuan untuk memberi makan pada orang yang membutuhkan atau sering disebut *food sharing*. Sistem dari food sharing ini adalah dengan mendeliverikan makanan pada orang yang membutuhkan atau juga dapat dilakukan dengan mendonasikan berupa uang dan selain itu juga dapat dengan melakukan pembelian pada produk UMKM lokal. Tujuan dari program ini adalah agar tidak ada orang yang mengalami kekurangan pangan dan kelaparan. *Channel Youtube:* Milan Urban Food Policy Pact *Link:* https://youtu.be/qFCalLcJVpw
3.	Arimbi	Kota Bandung adalah kota metropolitan yang mana nasi adalah makanan yang disukai oleh masyarakat. Terdapat 91 kg nasi yang dikonsumsi perorangan di Kota Bandung. Di Kota Bandung karyawan yang memiliki penghasilan penengah sekitar 5 juta per bulan memiliki gaya hidup yang mahal dan terbilang boros. Namun pada saat wabah pandemi Covid-19 hampir dari semua kalangangan masyarakat terkena dampak dari segi ekonomi. Hal ini membuat masyarakat perlu untuk memiliki gaya yang lebih ekonomis. Orang – orang Dengan kebiasaan konsumtif yang mahal kemudian kurang pengetahuan mengenai harga pasar sedangkan masyarakat perlu untuk memilih sebelum membeli dan pergi ke pasar. Arimbi merupakan aplikasi yang dapat membantu masyarakat dalam melihat harga pasar. Fitur-fitur aplikasi yang ditawarkan antara lain, harga bahan makanan, ketersediaan tempat tidur rumah sakit dan cctv di jalan. Dimana aplikasi ini lebih update dalam memberikan informasi harga di pasar dan juga aka nada notifikasi jika terjadi perubahan harga. *Channel Youtube:* Milan Urban Food Policy Pact *Link:* https://youtu.be/ihiitEFn5tw
4.	Kang Pisman (Kurang, Pisahkan, Manfaatkan)	Sampah organik yang terus dihasilkan seiring dengan kebutuhan masyarakat. Membuat Kota Bandung setiap harinya menghasilkan 1.601ton sampah makanan perharinya. Kota Bandung kemudian membuat Program yang di sebut Kang Pisman (Kurangi, Pisahkan, Manfaatkan), program ini sesuai dengan konsep 3R yaitu, *Reduce, Reuse* dan *Recycle.* Keistimewaan dari program ini antara lain, yang pertama Gerakan ini bersifat masif dan dilaksanakan oleh seluruh komponen masyarakat. Kedua masyarakat dapat mengolah sampahnya secara mandiri. Dengan metode yang dipilih sendiri dan disesuaikan dengan sumber sampah, sarana dan pengetahuan yang dimiliki masing-masing masyarakat. Pengelolaan sampah ini dengan

		melibatkan masyarakat dalam memisahkan sampah sebelum di proses dan diintegrasikan pada pertanian. Maka pengolahan sisa makanan dapat bermanfaat. *Channel Youtube:* Milan Urban Food Policy Pact *Link:* https://youtu.be/bTUvw5Wp8KU

Sumber: *Channel Youtube* Milan Urban Food Policy Pact

Kota Bandung sendiri mengirimkan 4 video pengembangan sistem pangan. Video itu antara lain Buruan SAE, Badami, Arimbi, dan Kang Pisman. Keadaan pandemi Covid-19 menunjukan bahwa kota-kota berada di garda terdepan dalam memberikan solusi konkrit terhadap kebutuhan warga. Secara khusus, tim kebijakan pangan harus menghadapi banyak tantangan mendesak yang tak terduga karena sistem pangan perkotaan telah sangat terpukul oleh guncangan eksternal ini. Dari 4 video yang dikirim Badami merupakan program yang sangat berkaitan dengan situasi Covid-19 pada saat itu dimana Badami adalah Program Food Sharing dimana masyarakat dapat memberikan donasi untuk memberikan makan pada masyarakat yang kurang mampu dan sangat terkena dampak dari pandemi.

Pada tahun 2021 Kota Bandung terpilih menjadi *Steering Committee* MUFPP memiliki tugas untuk mengkoordinir kota yang bergabung dalam MUFPP di wilayah tersebut. Dalam rancangan agenda MUFPP 2021-2023, Kota Bandung sebagai salah satu anggota MUFPP Regional Asia Pasifik dimana terdapat tujuan agenda yang salah satunya adalah menyelenggarakan dua forum *regional online* pada tahun 2022 dan 2023. Selain itu, 4 webinar akan diadakan dua kali setahun, 2 diselenggarakan oleh masing-masing perwakilan Komite Pengarah.

Kota Bandung sendiri telah menyelenggarakan Agenda forum regional yang dilaksanakan pada tanggal 03 - 04 agustus 2022 dengan tema "*Improving City Food Security and Creating Work Through Urban Farming Besed on Culture and Technology"* acara ini terdiri dari dua kegiatan yaitu konferensi internasional pada Hari pertama, acara ini berlangsung di kampus Universitas Katolik Parahyangan dan juga ada yang melalui online via zoom bagi yang berada diluar kota. Terdapat beberapa kota yang terkarik bergabung dalam MUFPP saat acara forum regional tersebut antara lain, Kabupaten Gorontalo, Kota Tarakan, Kota Banjarbaru, Kota Makassar, Kota Bontang, dan Kota Seberang Perai, Malaysia. Sebelumnya Kota Bandung juga telah berhasil mengajak kota lain untuk bergabung dalam MUPP seperti Kota Semarang, Kota Pekanbaru, Kota Sukabumi.

Pada hari kedua tanggal 4 Agustus 2022 agenda yang dilakukan adalah kunjungan lapangan. Para peserta dari acara ini dibawa untuk berkunjung ke beberapa spot atau titik dari Buruan SAE. Buruan SAE Kota Bandung setelah agenda ini banyak mendapat apresiasi masyarakat dan pihak internasional karena dapat memanfaatkan halaman rumah menjadi ketahanan pangan sebagaimana dijelaskan Humas Pemkot Bandung. Hasil dari kunjungan ini pun membuat 7 kota yang hadir pada saat kunjungan ini menjadi bagian dalam MUFPP dengan penandatanganan Pakta Milan. Acara ini bertujuan untuk mengatasi masalah ketimpangan pada akses ke pangan dan mendesak kota-kota untuk membuat sebuah sistem pangan yang lebih berkelanjutan untuk memastikan ketahanan pangan yang dan juga peluang ekonomi yang lebih baik.

Implementasi MUFPP dalam pengembangan sistem pangan berkelanjutan di Kota Bandung Berjalan dengan sangat lancar, pada tahun 2020 saat *Milan Pact Talks* Kota Bandung mengirim 4 praktik pengembangan sistem pangan yang mana Buruan SAE Kota Bandung dianggap sebagai praktik terbaik dalam *food supply* and Distribution. Buruan SAE memang telah dirancang sebelum Kota Bandung Bergabung dalam MUFPP namun setelah bergabung dalam MUFPP Kota Bandung diberikan saran dan masukan mengenai praktik Buruan SAE ini untuk kedepannya dapat lebih dikembangkan dengan membuat pembagian variasi penghasil jenis pangan di setiap titik tempat Buruan SAE. Maka dapat disimpulkan bahwa Kota Bandung dalam pengembangan sistem pangan yang berkelanjutan melalui hubungan luar negeri atau paradiplomasi dapat memberikan opsi dalam langkah pengembangan sistem pangannya.

Negara sebagai penanggung jawab yang wajib untuk menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakatnya memberikan madat dan kebebasan dalam menyelesaikan sebuah permasalahan yang dianggap perlu melalui keterlibatan aktor *sub-state*, dalam hal ini secara langsung tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Kewenangan Daerah Otonom Untuk Melaksanakan Kegiatan di Bidang Kerja Sama Internasional mengatur dalam Pasal 42 (1) bahwa DPRR berkewajiban dan berhak menyetujui rencana kerja sama internasional yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Klarifikasi pasal tersebut juga menyebutkan bahwa selain *sister city/sister province*, pemerintah daerah juga dapat mengadakan perjanjian kerjasama teknis yang mengatur pemberian bantuan kemanusiaan, kerjasama dalam pemberian pinjaman/hibah, kerjasama dalam penyertaan modal dan lain-lain. Hal ini menurut penulis sendiri lebih dapat mempermudah sebuah negara untuk dapat menyelesaikan permasalahan dengan mudah, dikarenakan para pemerintah daerah lebih tahu dan paham mengenai kondisi sebenarnya yang dialami dan apa yang diperlukan untuk di kembangkan dalam sebuah daerah.

MUFPP yang pada tahun 2015 melahirkan sebuah kebijakan dan kerangka kerja yang dapat menjadi pilihan bagi setiap anggotanya dalam langkah pengembangan sistem pangan. Sementara *Outcome* dari MUFPP bagi Kota Bandung terlihat pada 3 kategori kebijakan dan 12 poin kerangka kerja atau rekomendasi aksi yang telah di implementasi oleh Kota Bandung. *Impact* nya dapat dilihat dari bagaimana setiap implementasi MUFPP yang dilakukan oleh Kota Bandung dapat memberikan manfaat bagi Kota Bandung. Terbukti pada bagimana kemudian terbentuk beberapa program yang bermanfaat dan juga 2 aplikasi yang telah dirilis dan memberikan dampak yang baik pada masyarakat Kota Bandung.

MUFPP termasuk dalam variabel independen *Problem-Solving Capacity* (penyelesaian masalah). *Problem solving capacity* yaitu untuk memecahkan masalah adalah solusi dari masalah yang terkait dengan efektivitas. Berdasarkan tiga indikator keterampilan, *problem solving capacity* yaitu struktur kelembagaan, distribusi kekuasaan, keterampilan dan energi. Kerangka kelembagaan karenanya memuat aturan-aturan, hal ini dapat dilihat pada kebijakan dan kerangka kerja yang ada dalam MUFPP. MUFPP memiliki pemerintahan MUFPP, dengan Kota Bandung sendiri sebagai *Steering Committee*.

Namun dari sekian kerangka kerja dari MUFPP yang diimplementasikan oleh Kota Bandung, penulis mendapatkan adanya beberapa kekurangan dalam

penerapan rekomendasi, melihat pada permasalahan pangan di Kota Bandung dan tujuan dari Kota Bandung itu sendiri dalam mewujudkan pengembangan sistem pangan yang berkelanjutan maka terdapat beberapa poin yang relevan untuk diwujudkan dari point - poin kerangka kerja yang telah dijabarkan di atas.

Meskipun Kota Bandung telah memiliki program Kang Pisman dalam upaya penanganannya. Namun masih kurang maksimal, Tindakan yang dapat diadopsi dalam menangani permasalahan ini terdapat pada kategori kebijakan sampah makanan, rekomendasi aksi yang dapat dilakukan, yaitu rekomendasi aksi No.34, membuat perkumpulan ahli sistem pangan untuk menilai dan memantau hilangnya makanan dan pengurangan limbah. Melalui aksi ini Kota Bandung dapat menganalisis dan memantau limbah pangan yang dihasilkan di berbagai sektor dengan ahli sistem pangan, sehingga data yang dihasilkan dapat menemukan solusi dalam pengurangan limbah pangan. sehingga program Kang Pisman yang dibuat oleh Kota Bandung dapat lebih efektif untuk dilaksanakan dan tidak hanya sekedar program yang tidak digunakan oleh masyarakat.

Tindakan yang dapat diadopsi Kota Bandung sebagai anggota MUFPP untuk pengembangan sistem pangan dapat diadopsi dalam Kebijakan tata kelola dan produksi makanan dalam MUFPP berikut aksi yang dapat di adopsi, antara lain sebagai berikut:

1. Rekomendasi aksi no.1, Memfasilitasi kolaborasi antar lembaga dan departemen kota dan mencari keselarasan kebijakan dan program yang berdampak pada sistem pangan di berbagai sektor dan tingkat administrasi, mengadopsi dan mengarusutamakan pendekatan berbasis hak; opsi dapat mencakup dedikasi staf kota permanen, peninjauan tugas dan prosedur dan relokasi sumber daya. Tindakan ini perlu untuk di adopsi oleh Kota Bandung dikarenakan perlu adanya kolaborasi antara lembaga atau para pemangku kepentingan dalam mencari keselarasan kebijakan dan program dalam sistem pengembanga panga yang lebih berkelanjutan. Seperti kolaborasi antara lembaga Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung dengan para Pemerintahan di beberapa desa maupun perkotaan dalam menyelaraskan atau membuat program yang dapat saling bekerjasama untuk membuat sistem pangan yang berkelanjutan.
2. Rekomendasi aksi no.2 Meningkatkan partisipasi pemegang kepentingan di tingkat kota melalui dialog politik, dan penunjukan penasihat kebijakan pangan dan/atau pengembangan platform multi-pemegang kepentingan atau dewan pangan, serta melalui pendidikan dan peningkatan kesadaran. Hal ini juga perlu untuk di adopsi oleh Kota Bandung dikarenakan perlu adanya keselarasan persepsi dalam pengembangan sistem pangan maka dari itu Pemerintah Kota Bandung perlu membuka dialog demi mengetahui kebijakan dan lankah yang terbaik dalam pembangan sistem pangan di kota tersebut. penulis mendapati fakta baru saat mengikuti acara forum regional Kota Bandung pada tanggal 3 saat sesi dialog dimana terdapat perbedaan persepsi dalam penanganan atau upaya dalam penanggulangan pangan di Kota Badung. Seperti perbedaan persepsi mengenai kurangnya pangan terjadi dikarenakan berkurangnya jumlah para petani yang mana alasan yang mendasar dikarenakan banyak anak petani yang tidak ingin melanjutkan pekerjaan orang tuanya yaitu menjadi petani. Menurut penulis sendiri hal ini kurang baik untuk diterapkan jika anak petani harus mengikuti atau di paksa

untuk mengikuti pekerjaan orang tuanya penulis rasa itu melanggar hak dan kebebasan seseorang untuk memilih. Menurut penulis metode yang baik untuk permasalahan ini adalah dengan memberikan beasiswa pertanian untuk anak pedesaan yang ingin melanjutkan usaha orang tuanya agar desa tersebut dapat membawa metode pertanian yang baru.

3. Rekomendasi aksi no.3, Mengidentifikasi, memetakan dan mengevaluasi inisiatif lokal dan gerakan pangan masyarakat sipil untuk mengubah praktik terbaik menjadi program dan kebijakan yang relevan, dengan dukungan penelitian lokal atau lembaga akademis. Perlunya pemetaan, mengidentifikasi dan mengevaluasi gerakan pangan masyarakat sipil, Pemerintah Kota Bandung dapat mengetahui praktik atau program dan kebijakan yang relevan untuk pengembangan sistem pangan di kota tersebut. Misalnya dengan membuat program yang sesuai pada beberapa daerah sehingga dapat menghasilkan pangan yang lebih berkualitas dan berkelanjutan.
4. Rekomendasi No.39, Mencari koherensi antara kota dan produksi pangan pedesaan terdekat, pengolahan dan distribusi, berfokus pada produsen petani kecil dan keluarga petani, memberikan perhatian khusus pada pemberdayaan perempuan dan pemuda. Tindakan ini dapat diadopsi untuk mensuport produksi pangan kota dan pedesaan sehingga korelasi antar keduanya dapat seimbang.

Dengan bergabung dalam MUFPP ini banyak memberikan opsi tindakan dalam pengembangan sistem pangan bagi Kota Bandung melalui Kebijakan dan Kerangka Kerja yang telah direkomendasikan. Pengembangan Sistem pangan di Kota Bandung dengan melakukan kerjasama luar negeri dengan tujuan untuk mencapai kepentingan regionalnya. Namun perlu diperhatikan bahwa praktik-praktik yang dibuat oleh anggota yang bergabung dalam MUFPP bukan lah bentuk persaingan tentang Kota mana yang menghasilkan praktik terbaik tetapi merupakan aksi bersama dalam pengembangasistem pangaan yang nantinya dapat dibagikan kepada kota lain dan dapat ditiru jika dianggap sesuai dengan kondisi dan permasalahan pangan di kota tersebut. Dari kerangka kerja dan kebijakan MUFPP yang telah dijabarkan, Kota Bandung sebagai angota dalam MUFPP telah berkomitmen untuk mengembangkan sistem pangan yang berkelanjutan diharapkan dapat berhasil dalam pengembangan sistem pangan yang berkelanjutan.

Pencapaian yang sangat memuaskan yang diperoleh Kota Bandung semenjak bergabung dalam MUFPP antara lain, Suksesnya Program Buruan SAE yang menyita banyak perhatian negara anggota lain untuk di adopsi dan pengakuan dari MUFPP bahwa Buruan SAE menjadi praktik terbaik dalam kategori *food supply and distribution*. Selain itu Kota Bandung setelah bergabung dalam MUFPP sejak tahun 2020 mendapat mandat untuk menjadi Steering Committee di MUFPP Asia Pasifik. Maka Kota Bandung memiliki tanggung jawab yang besar dalam memastikan kota-kota lain mengembangkan sistem pangan yang berkelanjutan di wilayah Asia Pasifik.

Kesimpulan

Sebagai salah satu kota metropolitan di Indonesia, Kota Bandung masih bergantung pada suplai pangan dari luar daerah lain, menunjukkan bahwa Kota

Bandung perlu untuk mengembangkan sistem pangan berkelanjutan agar dapat lebih mandiri dalam penyediaan pangan terhadap masyarakatnya. Maka dari itu Kota Bandung berupaya untuk mengembangkan sistem pangan berkelanjutan dengan bergabung dalam pakta perjanjian MUFPP. Langkah yang diambil Kota Bandung ini merupakan fenomena Paradiplomasi dimana Kota Bandung sebagai aktor sub-state yang melakukan kerjasama luar negeri. MUFPP merupakan perjanjian internasional yang bertujuan untuk mengembangkan sistem pangan berkelanjutan. Para anggota yang bergabung dalam MUFPP berkomitmen untuk mengembangkan sistem pangan yang berkelanjutan dan membangun praktik pangan terbaik bagi kota mereka. MUFPP sendiri memberikan beberapa pilihan Kebijakan dan Kerangka Kerja yang mana setiap kota yang bergabung dalam MUFPP dapat memilih rekomendasi aksi yang mana yang sesuai dengan kondisi dan permasalahan pangan bagi masing-masing kota.

Kota Bandung sendiri telah mengimplementasikan beberapa Kerangka kerja atau rekomendasi aksi dari MUFPP. Hingga saat ini Kota Bandung telah mengimplementasikan kebijakan dan rekomendasi aksi dari MUFPP. Meskipun dalam pengimplementasiannya terdapat satu program yang dilakukan Kota Bandung yang dirasa masih kurang efektif dalam pelaksanaannya. Maka terdapat beberapa poin rekomendasi yang menurut penulis perlu atau lebih tepat untuk dijalankan dan dioptimalkan oleh Pemerintah Kota Bandung dalam mengembangkan sistem pangan yang berkelanjutan bagi masyarakat Kota Bandung.

Apa yang dilakukan Kota Bandung bergabung dalam MUFF yang memiliki jejaring kota-kota dunia yang tentunya sudah lebih maju dalam pembangunan kotanya dengan memanfaatkan keran paradiplomasi adalah fenomena baru. Sebelumnya, fenomena kerjasama antar kota di dunia dengan kerangka *sister city* pada realitanya berjalan satu arah dan nilai kolaborasi dari kerjasama tersebut tidak muncul. Hal tersebut daapat dilihat dari penelitan Widiani, dimana dalam pelaksanaan kerjasama terdapat berapa hambatan seperti, Kegiatan yang bersifat *High Cost* (Biaya Tinggi) dan terbatasnya anggaran, Kebijakan dan Budaya Pemerintahan Daerah Terkait, Komunikasi dan Kesiapan Pemerintah Kota dan Keterlibatan *Stakeholders.* Demikian pula dalam hasil penelitiannya Daulay dkk. dimana pemerintah kota Surabaya hanya ingin mengadopsi apa yang sudah dilakukan kota Kitakyushu yang sudah berpengalaman dalam menata kotanya menjadi *green city.* Dengan demikian, fenomena kerjasama yang dilakukan kota Bandung melalui praktik paradiplomasi dengan perantara NGO yaitu MUFPP bisa menjadi acuan dan diikuti kota-kota lain di Inodnesia dalam menyelasaikan permaslahannya.

Daftar Pustaka

Admin, *Milan Urban Food Policy Pact'*, 2022. Tersedia pada https://www.milanurbanfoodpolicypact.org/

_____, *Bandung Food Smart City*. Tersedia pada https://bandungfoodsmartcity .org/about-us-2/

_____, *234 Titik Buruan SAE Tersebar di Seluruh Kelurahan di Kota Bandung.* Tersedia pada https://www.beritainspiratif.com/read/64254/234-titik-buruan-sae-tersebar-di-seluruh-kelurahan-di-kota-bandung

_____, *Komposisi Sampah, SIPSN - Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional*. Tersedia pada https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/komposisi

Badan Pusat Statistik Kota Bandung, *Jumlah Penduduk,* 2020. Tersedia pada https://bandungkota.bps.go.id/ indicator/12/32/1/jumlah-penduduk.html

Calori, Andrea, Francesca La Rocca, and Bianca Minotti, *Empowering Urban Youth for Food and Climate Action* (Milan: ShareAlike 4.0 International License, 2022). Tersedia pada https://www.foodwave.eu/wp-content/uploads/2022/04/Food-Wave-18-cities-report-FINAL_compressed.pdf

Daulay, Yusri Pautan 'Pelaksanaan Paradiplomasi Pemerintahan Kota Medan Dalam Kerjasama Sister City Kota Dengan Kota Gwangju Dan Ichikawa', 2019. https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/32123

Iwan, R. *Uban Farming Buruan SAE Kota Bandung Mentas Di Dunia,* 2021, Tersedia pada https://www.inilahnews.com/news/pr-1191371911/uban-farming-buruan-sae-kota-bandung-mentas-di-dunia

Mansyur, Alia Rizka 'Paradiplomasi Melalui Kerjasama Sistercity: Upaya Untuk Meningkatkan Potensi Industri Pariwisata Di Kabupaten Sumenep', 16 (2021). https://www.ejournalwiraraja.com/index.php/FISIP/article/view/1166/1107

Milan Pact Secretariat, *Milan Urban Food Policy Pact Regionalisation Process: Action Plan 2021-23*, 2021, Tersedia pada https://www.milanurbanfoodpolicypact.org/wp-content/uploads/2021/12/MUFPP-Regionalisation-Process-Action-Plan-2021-23.pdf

Mukti Takdir, *Paradiplomacy Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemda di Indonesia* (Yogyakarta: The Phinisi Press Yogyakarta, 2013)

Nova Lastriana, Giatkan Konsep Ketahanan Pangan, Ratusan Buruan Sae Hadir Secara Sukarela, 2021. Tersedia pada https://www.bandung.go.id/news/read/5711/giatkan-konsep-ketahanan-pangan-ratusan-buruan-sae-hadir-secara-sukarela#:~:text=Namun%2C%20masyarakat%20secara%20sukarela%20menduplikasi,sampai%20September%20jumlahnya%20terus%20bertambah.

Pemkot Bandung, *Buku Lll Masterplan BSC, Bandung Smart City,* 2020. Tersedia pada https://smartcity.bandung.go.id/ebook/130

Rahmadan, ZB, Program Kota Bandung Buruan Sae Menginspirasi Dunia Internasional Di Konferensi U-20, 2022. Tersedia pada https://www.zonabandung.com/bandung-raya/pr-1204067532/program-kota-bandung-buruan-sae-menginspirasi-dunia-internasional-di-konferensi-u-20?page=1> [accessed 31 August 2022].

Rifat Alhamidi – detikJabar "Buruan Sae Kota Bandung Dilirik Dunia Internasional" Tersedia pada https://www.detik.com/jabar/jabar-gaskeun/d-6217267/buruan-sae-kota-bandung-dilirik-dunia-internasional.

Sysadmin, *Ketahanan Pangan: Beralihnya Fungsi Lahan, Pasokan Pangan Kota Bandung Diimpor Dari Luar Daerah*, 2016 Tersedia pada https://www.bandung.go.id/news/read/1426/ketahanan-pangan-beralihnya-fungsi-lahan-pasokan-pangan-kota-bandung-diimpor-dari-luar-daerah.

Tiah SM, *Buruan SAE DKPP Kota Bandung Raih Penghargaan Nasional dan Internasional, Makin Terasa Manfaatnya*. 2021, Tersedia pada https://jabar.tribunnews.com/2021/11/18/buruan-sae-dkpp-kota-bandung-raih-penghargaan-nasional-dan-internasional-makin-terasa-manfaatnya?page=2

Wisma Putra – detikNews "Dipuji Ma'ruf Amin, Kota Bandung Punya Ratusan Lokasi Urban Farming" tersedia pada https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5747594/dipuji-maruf-amin-kota-bandung-punya-ratusan-lokasi-urban-farming.

Wiyono, Bambang, *Bandung Jadi Kota Terpadat Ke-6 di Asia Tenggara, Surabaya Nomor 8*' 2022. Tersedia pada https://bali.tribunnews.com/2022/02/20/ bandung-jadi-kota-terpadat-ke-6-di-asia-tenggara-surabaya-nomor-8

Yollanda, L., 'WTO Menghegemoni Kebijakan Ketahanan Pangan Di Indonesiamelalui Agreement on Agriculture', *Satu, Buku Kelembagaan, Dasawarsa Pangan, Ketahanan Indonesia, Kementerian Pertanian*, 2016, 1